

ANALISIS WACANA KRITIS PADA KETERANGAN PERS MENTERI PERTAHANAN DEMONSTRASI AGUSTUS 2025 DALAM YOTUBE @SEKRETARIAT PRESIDEN

Erika Noviyanti¹, Nara Garini Ayuningrum²

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

erikanoviyanti290902@gmail.com¹, naragarini@untag-sby.ac.id²

ABSTRAK

Demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025 menjadi aksi protes masyarakat setelah beredarnya video *viral* anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sedang menari di dalam ruangan dan tunjangan DPR yang dirasa terlalu tinggi di mata masyarakat, sehingga hal tersebut dapat memicu kemarahan publik. Aksi demonstrasi yang terjadi juga tak lepas dari respon dan pantauan pemerintah untuk bagaimana mengetahui sejauh mana unjuk rasa yang dilakukan masyarakat itu terjadi, hingga kemudian pada menteri pertahanan turun untuk melakukan keterangan persnya dalam menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat. Wacana yang menjadi bagian dari suatu teks baik itu berupa tulisan atau lisan yang ditujukan pada sasaran audiens juga tersembunyi makna dan pesan dibalik suatu informasi atau teks yang disebarluaskan kepada khalayak. Sederhananya adalah, maksud dan wacana apa saja yang ada dibalik tutur kata yang disampaikan oleh komunikator tersebut untuk masyarakat luas, yang kemudian dapat dianalisis. Kekerasan simbolik yang terjadi tanpa adanya keterlibatan fisik, membuat beberapa di antaranya tidak menyadari hal tersebut. Kekerasan simbolik yang dilakukan tentu saja bertujuan untuk mempertahankan sebuah kekuasaan yang dilakukan oleh para elit yang berkuasa. Melalui penerapan gaya bahasa yang dilakukan, hal ini secara tidak langsung juga dalam pengucapannya dapat membuat para komunikan atau audiens merasa takut dan terancam tanpa melibatkan kontak secara fisik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Data diambil dari video pada naskah keterangan pers menteri pertahanan dan penulis transkrip yang kemudian dianalisis. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui wacana apa aja yang terlihat pada naskah keterangan pers menteri pertahanan dalam YouTube @Sekretariat Presiden, berkaitan dengan aksi demonstrasi Agustus 2025 yang kemudian dianalisis menggunakan Metode Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dan mengkajinya dengan teori kekerasan simbolik Pierre Bourdieu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, setidaknya terdapat tiga wacana yang didapat. Wacana pertama adalah Legitimasi Kekuasaan dalam Pemerintah. Wacana kedua adalah Demonstrasi = Anarkis. Wacana ketiga adalah Solidaritas nasional?.

Kata Kunci : Wacana, Demonstrasi, Kekerasan Simbolik, Media Sosial YouTube

ABSTRACT

The demonstrations that took place in August 2025 became a public protest after the circulation of a viral video of members of the House of Representatives dancing indoors and DPR allowances that were deemed excessive by the public, thus triggering public anger. The demonstrations that occurred were also inseparable from the government's response and monitoring to determine the extent of the demonstrations carried out by the people, until then the Minister of Defense stepped in to give a press statement in response to the demonstrations carried out by the people. Discourse that is part of a text, whether written or spoken, aimed at the target audience also hidden meanings and messages behind information or texts disseminated to the public. Simply put, what are the intentions and discourses behind the speech delivered by the communicator to the wider public, which can then be analyzed. Symbolic violence that occurs without physical involvement, makes some of them unaware of it. The symbolic violence carried out is of course aimed at maintaining a power exercised by the ruling elite. Through the application of the language style, this indirectly also in its pronunciation can make the communicant or audience feel afraid and threatened without involving physical contact. This study uses a qualitative approach using a descriptive research type. Data were taken from the video in the press statement script of the Minister of Defense and the transcript writer which were then analyzed. This study seeks to determine what discourses are seen in the press statement script of the Minister of Defense on YouTube @Sekretariat Presiden, related to the August 2025 demonstrations which were then analyzed using Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis Method and examined with Pierre Bourdieu's theory of symbolic violence. The results of this study indicate that there are at least three discourses obtained. The first discourse is the Legitimacy of Power in Government. The second discourse is Demonstration = Anarchy. The third discourse is National Solidarity?.

Keywords: *Discourse, Demonstration, Symbolic Violence, Social Media YouTube*

A. PENDAHULUAN

Demonstrasi yang dilakukan masyarakat merupakan aksi yang sah yang dapat dilakukan di Indonesia. Adanya aksi demo tersebut juga tentu berkaitan dengan suatu hal yang tidak sepadan atau sesuatu yang berlainan dengan pandangan masyarakat. Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum bahwa yang dimaksud dengan unjuk rasa atau biasa disebut dengan demo adalah aktivitas yang dilakukan oleh seorang atau kelompok untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratik di hadapan umum. (Oktariza et al., 2025). Agustus 2025 menjadi bulan jalannya demonstrasi yang dilakukan masyarakat berkaitan dengan beredarnya video anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sedang menari dalam ruangan. Di samping itu, demonstrasi yang terjadi pada masyarakat menjadi salah satu dari pemberitaan yang ramai dibicarakan pada Agustus-September 2025 itu antara lain, dilakukan dengan berbagai maksud dan tujuan masyarakat sebagai tindak protes mengenai suatu hal.

Dilansir dalam CNBC Indonesia (2025), bahwa unjuk rasa yang dilakukan oleh massa ini terjadi karena untuk memberikan suara tentang rasa kecewa masyarakat terhadap anggota DPR, salah satu utama fokusnya ialah tentang kenaikan tunjangan anggota DPR. Masyarakat juga meminta untuk membatalkan kebijakan tunjangan rumah, transparansi gaji yang ada, juga membatalkan kenaikan gaji anggota DPR, hal ini tentu saja bisa memicu kemarahan publik, yang berimbas pada terbentuknya aksi demonstrasi yang dilakukan pada Agustus 2025 oleh masyarakat. Beragam komentar publik berkaitan dengan isu DPR saat itu pun nyatanya menjadi berita yang hangat dibicarakan oleh masyarakat, lantaran hal demikian tentunya membuat warga negara bergejolak hebat, karena dinilai tidak adil.

Aksi tersebut tentu saja tetap pada pantuan pemerintah yang terus mengawasi kondisi sosial, ekonomi, dan politik negara, terlebih pada stabilitas keamanan negara. Oleh karena itu, tak lepas dari pengawasan atau pantauan negara maksudnya adalah pemerintah, sampai pada turunnya menteri pertahanan untuk melakukan keterangan persnya, yakni merespon dan menanggapi terkait aksi demonstrasi Agustus 2025 yang dilakukan masyarakat. Melihat dengan apa yang terjadi, dalam konteks ini maka penting untuk mengetahui bagaimana pandangan atau kacamata pemerintah yang dalam hal ini adalah negara, untuk bagaimana menilai aksi yang dilakukan oleh masyarakat. Tak luput dalam pemberitaan media massa juga, mengingat zaman sekarang informasi yang mudah diakses melalui internet, aksi demonstrasi tersebut juga diliput oleh banyak media massa *online* dalam memproduksi pemberitaan. Sehubungan dengan apa yang terjadi, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat tak lepas dari pantauan pemerintah, yang ingin diketahui bagaimana kiranya prespektif pemerintah mengenai aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat melalui keterangan persnya pada 31 Agustus 2025 yang diunggah dalam YouTube @sekretariat presiden. Melalui @YouTube Sekretariat Presiden akan dilihat, bagaimana konten dalam hal ini adalah teks, atau naskah videonya menyoroti dan menonjolkan pemberitaan yang ditulis untuk masyarakat sehingga lebih informatif dan dapat ditarik maksud kesimpulan dari pernyataan pada naskah berupa video yang diunggah. Seperti terkait dalam

pemberitaan aksi demonstrasi yang dimuat, bagaimana channel YouTube memberitakan di media sosial, tentang siapa yang berbicara, bagaimana isinya atau apa yang sedang dibicarakan, dan untuk siapa teks tersebut dimuat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Media sosial YouTube selain sebagai bentuk hiburan, juga dimanfaatkan sebagai alat menyebarkan informasi kepada publik untuk kemudian publik akan beradaptasi pada lingkungannya. Pengguna media sosial di Indonesia lebih banyak yang menggunakan platform YouTube daripada menggunakan medsos lain. Seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia, bahwa YouTube tetap menjadi raja dari media sosial di Indonesia. (Pasaribu et al., 2024). Media sosial merupakan komunikasi dua arah, yang didalamnya membuat para penggunanya semakin rajin dalam menggali dan memberikan sebuah informasi – informasi tentang dunia politik dan pandangan-pandangan dengan tujuan mengajak orang-orang di jejaring media sosialnya. (Aji et al., 2023). Media sosial memiliki berbagai manfaat bagi manusia di era modern saat ini, media sosial menghapus batasan manusia untuk saling bersosialisasi, batasan seperti ruang maupun waktu melalui media sosial. (Murbantoro et al., 2023)

Wacana yaitu peristiwa komunikasi yang realisasi dalam bentuk ujaran, yang mempunyai kohesi dan koherensi berkesinambungan. Menurut Syamsuddin A.R dalam Sudaryat (2008:111) Wacana adalah rangkaian ujar atau tindak tutur yang mengemukakan suatu subjek secara teratur (sistematis) dalam satu kesatuan yang koheren dan dibentuk oleh unsur segmental maupun nonsegmental bahasa. Dengan demikian, wacana bisa juga disebut hasil dari suatu jejak rekaman peristiwa komunikasi utuh yang menggunakan bahasa. Wacana sebagai satuan bahasa yang utuh yang tersusun secara sistematis dari rentetan kalimat dengan bentuk keterpaduan makna yang berkesinambungan, juga mempunyai tujuan yang jelas dan sesuai dengan unsur konteks membangun yang berada di dalamnya. (Tania & Hermaliza, 2021). Melalui keterangan pers menteri pertahanan dalam YouTube @sekretariat presiden, dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, sebagai pisau bedah yang terdapat tiga bagian penting dalam analisis, diantaranya adalah dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosial, kemudian mengkajinya dengan Teori Kekerasan Simbolik Pierre Bourdieu.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang mengkaji secara menyeluruh tentang suatu pemikiran. Metode deskriptif kualitatif dijelaskan dengan menggunakan paradigma kritis. Penggunaan kualitatif deskriptif ini karena jenis penelitian tersebut adalah jenis penelitian yang didasarkan pada fakta atau fenomena yang berkembang dalam masyarakat luas. Unit observasi yang diamati dan dikumpulkan secara langsung adalah naskah dalam keterangan pers yang diunggah dalam YouTube @sekretariat presiden, berupa keterangan pers (pernyataan, teks, dan kutipan), sedangkan unit analisisnya adalah apa saja wacana yang terbentuk dalam teks yang disajikan atau yang diucapkan oleh menteri pertahanan saat melakukan keterangan pers. Data diperoleh dari informasi, baik dalam bentuk buku maupun tulisan yang berupa laporan untuk mendukung data dalam penelitian. Maryati&Suryawati (2007) dalam (Jose, 2024) menjelaskan bahwa, studi dokumentasi adalah suatu kegiatan pengumpulan data dan informasi dari bermacam sumber, baik buku yang memuat beragam kajian maupun teori yang diperlukan oleh peneliti, majalah, naskah, kisah sejarah, dan dokumen. Termasuk juga rekaman berita dari radio, televisi, dan media elektronik lainnya (Jose, 2024). Proses menggalih dan menyusun secara sistematis sebuah data yang didapat dari hasil dokumentasi yang dilakukan itulah teknik analisis data. Pada penelitian yang akan dilakukan peneliti ini, data yang didapat oleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik. AWK Norman Fairclough yang terdapat tiga bagian penting, yaitu dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Teks merujuk pada berbagai jenis komunikasi verbal atau visual baik ucapan, tulisan, gambar dan perpaduan lainnya dari elemen linguistik yang membentuk suatu teks. Praktik diskursif mengandung semua kegiatan terkait dengan produksi dan konsumsi teks. Di dalamnya terjadi proses menghubungkan teks dengan produksi dan konsumsi teks, termasuk proses interpretasi. Praktik sosial adalah bagian dari konsep intertekstualitas, fenomena sosial menjadi bagian dari cara teks dibentuk dan membentuk praktik sosial itu sendiri.

D. TEMUAN

Tabel 1. Analisis Tekas Wacana 1

Wacana 1	Teks	Analisis teks
Legitimasi Kekuasaan Dalam Pemerintah	<i>“Saya mendapat tugas, didampingi oleh panglima TNI, Kapolri, menteri dalam negri dan juga kepala Badan Intelegen Negara, serta para tiga kepala staf angkatan darat, kepala angkatan laut, dan juga kepala staf angkatan udara.”</i>	Kalimat tersebut adalah kalimat utama yang dikatakan oleh Menteri Pertahanan pada saat melakukan keterangan Pers 31 Agustus 2025. Pada kata “Saya mendapat tugas,” merujuk pada suatu hal atau kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang atas perintah orang lain untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian kata dilanjutkan dengan menyebutkan anggota badan kemanan negara yang menunjukkan bahwa konferensi pers yang diselenggarakan oleh menteri pertahanan dengan didampingi oleh TNI, Kapolri, dan tiga Kepala Staf Angkatan, situasi ini jelas berkaitan dengan keamanan negara Indonesia karena bertautan dengan petugas aparaturnya.
	<i>“Saya mendapat tugas dari Bapak Presiden, untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi hasil dari Sidang Paripurna Kabinet Merah Putih yang baru saja kita selesaikan”</i>	Pada kalimat “Untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi hasil dari sidang paripurna kabinet merah putih” menjelaskan bahwa telah terjadi rapat penting mengenai suatu hal yang melatarbelakangi sidang atau rapat tersebut diadakan, hal ini dapat diketahui pada kata <i>Kabinet Merah Putih</i> , yang tentu di dalamnya diisi oleh anggota-anggota penting negara yang memiliki pengetahuan yang cukup dan diselenggarakan oleh pemerintah.
	<i>“Presiden dalam kaitan stabilitas nasional memberi penekanan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepada Tentara Nasional</i>	Pada kalimat “memberi penekanan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepada TNI untuk tetap solid dan bekerja sama, dan sama-sama bekerja dalam melaksanakan tugas” kalimat tersebut menunjuk Polisi dan TNI sebagai suatu instansi penting yang bertugas dalam

Indonesia untuk tetap solid dan bekerja sama, dan sama-sama bekerja dalam melaksanakan tugas untuk mencapai keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.”	tercapainya keamanan negara terhadap kondisi yang sedang dialami oleh Indonesia saat ini. Pada kata “ memberi penekanan ” merujuk pada suatu keharusan anggota kepolisian dan TNI dalam melaksanakan tugas tentang kerusuhan yang terjadi di Indonesia. Kata tersebut menjelaskan bahwa kepolisian dan TNI diharuskan memberi perhatian lebih terhadap suatu persoalan yang menjadi <i>concern</i> publik.
“Selain itu, dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan, baik yang dimiliki secara individu, pribadi, dan pejabat serta institusi negara, beliau telah menugaskan kepada Kapolri dan Panglima TNI,”	Pernyataan pada kalimat “ beliau telah menugaskan kepada Kapolri dan Panglima TNI, ” ini menjelaskan sekali lagi, bahwa Kapolri dan TNI diberikan tugas kepada Bapak Presiden untuk memberi perhatian lebih terkait faktor keamanan negara Indonesia.
“Badan Intelegen negara ditugaskan untuk terus memantau situasi Intelegen dan melaporkan kepada Bapak Presiden pada kesempatan-kesempatan pertama bila terjadi dinamika yang timbul di lapangan.”	Dalam hal ini, Badan Intelegen Negara mendapat kata “ ditugaskan, ” kata ini menunjukkan bahwa negara telah menyerahkan semua hal yang berkaitan dengan situasi Intelegen yang kemudian semua hasil laporan akan diserahkan kepada pimpinan tertinggi yang tidak lain adalah Presiden.
“Menteri dalam negeri ditugaskan untuk terus berkoordinasi dan mengendalikan pemerintahan di daerah dan juga mengikuti secara cermat perkembangan ekonomi	Berbeda dengan Kapolri, BIN, dan TNI, meski menteri dalam negeri juga mendapat kata “ ditugaskan ” namun memiliki makna dan tugas yang berbeda, dalam kalimat tersebut menteri dalam negeri mendapatkan sebuah tugas yang bukan berkaitan dengan keamanan negara, melainkan terkait perkembangan ekonomi yang dibutuhkan oleh warga negara Indonesia.

	yang dibutuhkan oleh rakyat.”	
	“Panglima TNI akan dibantu oleh kepala staf angkatan, baik angkatan darat maupun angkatan laut, serta angkatan udara, untuk terus memelihara keamanan di wilayah nasional kita, dan melakukan upaya-upaya pengamanan dan penertiban terhadap sumber daya alam yang mungkin dipergunakan secara tidak memenuhi ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang.”	Untuk kesekian kalinya anggota Panglima TNI dan penyebutan Badan Keamanan Negara seperti staf angkatan mendapat sebuah perintah yang berkaitan dengan keamanan negara di wilayah nasional. Pada kalimat “upaya-upaya pengamanan dan penertiban terhadap sumber daya alam yang mungkin dipergunakan secara tidak memenuhi ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang.” Upaya yang dimaksud sekali lagi berkaitan dengan keamanan negara dalam melakukan penertiban terkait sumber daya alam. Pada kata “yang mungkin dipergunakan” menunjukkan adanya kecurigaan yang belum pasti terhadap individu atau kelompok berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan.

Tabel 2. Analisis Teks Wacana 2

Wacana 2	Teks	Analisis Teks
Demonstrasi = Anarkis	“Presiden saat ini berada di tanah air dan terus memantau perkembangan-perkembangan yang ada di wilayah nasional kita, khususnya di Ibu kota di Jakarta.”	Menekankan tentang keberadaan presiden yang ada di dalam negeri, berkaitan dengan apa yang terjadi di wilayah nasional sedang dalam pantauan presiden. Artinya negara Indonesia saat itu sedang tidak baik-baik saja. Maksudnya adalah, gerak gerik- warga negara, atau apa yang dilakukan oleh masyarakat pada kata “terus memantau” menunjukkan perhatian utama presiden sedang tertuju pada masyarakat, mengingat aksi demonstrasi yang terjadi. Apabila seseorang atau kelompok sedang dalam pantauan, tentu saja hal ini merujuk

		pada adanya kecurigaan terhadap hal buruk yang mungkin saja terjadi. Apalagi menteri pertahanan menyebut <i>“Khususnya di Ibu Kota di Jakarta”</i> menunjukkan, bahwa DKI Jakarta adalah kota yang mendapat perhatian lebih, yang dicurigai akan terjadinya hal buruk dalam stabilitas keamanan nasional.
	<i>“Untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah yang terukur dan tegas terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum dan juga pelanggaran terhadap penegakan hukum.”</i>	Kalimat tersebut secara tidak langsung memberi peringatan kepada publik, bahwa para TNI dan Polri akan bertindak (<i>melakukan sesuatu</i>) kepada masyarakat, hal ini dapat dilihat melalui kata <i>“untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah yang terukur dan tegas”</i>, kalimat tersebut secara tidak langsung juga menunjukkan ancaman dari pemerintah kepada public, bahwa pemerintah tidak berpikir panjang untuk melakukan sesuatu kepada masyarakat <i>“terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum dan juga pelanggaran terhadap penegakan hukum.”</i> Sejatinya, ancaman atau peringatan itu sendiri dibuat setelah adanya sesuatu atau perlakuan yang dianggap melanggar norma, sosial, dan budaya dalam masyarakat di suatu wilayah. Maka dalam hal ini membuktikan, bahwa di mata pemerintah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat dianggap melakukan pelanggaran. Dilanjutkan dengan kata terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum dan juga pelanggaran terhadap penegakan hukum. Bahwa apa yang terjadi seakan sudah terjadi, berkaitan dengan pelanggaran hukum terhadap penegakan hukum.

<i>“Presiden memberi penegasan, agar supaya semua tindakan-tindakan pelanggaran yang bersifat kriminal, baik itu dalam bentuk kerusakan benda fasilitas umum, dan harta milik pribadi supaya dilaksanakan suatu penindakan yang tegas dan secara hukum.”</i> <i>“Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut soal keselamatan bagi pribadi maupun pemilik rumah pejabat yang mengalami penjarahan, maka petugas tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusakan dan pejarah yang memasuki wilayah pribadi maupun wilayah institusi negara yang memang sudah dipastikan untuk selalu dalam keadaan aman”.</i>	Sejalan dengan kalimat tersebut menunjukkan bahwa, pemerintah pada kata <i>“penindakan yang tegas dan secara hukum”</i> sekali lagi memberi peringatan kepada masyarakat terkait dengan apa yang dilakukan pada saat demonstrasi agustus 2025. Melalui keterangan persnya, menteri pertahanan juga menyebutkan “Presiden memberi penegasan”, bahwa seseorang dibalik yang apa yang dilakukan oleh menteri dalam keterangan persnya tidak lain adalah presiden. Pada kalimat tersebut, terlebih pada kalimat <i>“yang menyangkut soal keselamatan bagi pribadi maupun pemilik rumah pejabat yang mengalami penjarahan untuk mengambil tindakan tegas,”</i> mengartikan bahwa siapa saja yang melakukan hal buruk atau yang dimaksud disini adalah menjarah serta penyebutan kata <i>“pemilik rumah pejabat”</i> merujuk pada perlakuan khusus atau perlindungan untuk pejabat yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya, para pejabat mendapatkan perlindungan dari pemerintah saat unjuk rasa yang dilakukan oleh demonstrasi dinilai merupakan aksi yang berbahaya. Ungkapan pada <i>“para pelaku kerusakan dan pejarah yang memasuki wilayah pribadi maupun wilayah institusi negara”</i> menganggap bahwa, para demonstrasi merupakan pelaku kerusakan dan penjarah yang memasuki wilayah pribadi maupun institusi negara menjelaskan, demonstrasi atau dalam hal ini adalah rakyatnya sendiri yang melakukan aksi anarkis dalam wilayahnya
--	---

		(institusi negara). Menarik kesimpulan dalam kalimat tersebut merujuk pada, ungkapan <i>pelaku kerusuhan dan pejarah</i> yang tidak lain adalah rakyat, merupakan tindakan yang anarkis di mata pemerintah.
	<i>“Kepolisian Negara republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia akan bersikap tegas terhadap semua hal-hal yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta juga bisa mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.</i>	Pada kalimat <i>“terhadap semua hal-hal yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta juga bisa mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”</i> menjelaskan, pemerintah mengamati aktifitas yang dilakukan oleh rakyat sehingga memiliki anggapan bahwa, aksi unjuk rasa pada Agustus 2025 merupakan aksi yang mengganggu keamanan wilayah negara, sehingga Kapolri dan TNI diturunkan.
	<i>“Kepala kepolisian Republik Indonesia akan terus bekerjasama dengan Jaksa Agung dalam penegakan hukum secara cepat terhadap semua pelanggaran yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.”</i>	Kalimat tersebut mengungkap bahwa kepolisian negara akan menggandeng atau mengikutsertakan Jaksa Agung dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah Indonesia. Ini menjelaskan, masyarakat yang dinilai melakukan tindakan yang melanggar hukum berkaitan dengan aksi demonstrasi 28 Agustus 2025 akan ditindak <i>“secara cepat,”</i> hal ini membuktikan bahwa dengan adanya keterlibatan seorang Jaksa Agung menganggap, aksi demonstrasi tersebut benar-benar kegiatan atau aktivitas yang anarkis, sehingga harus ditindak secara cepat.

Tabel 3. Analisis Teks Wacana 3

Wacana 3	Teks	Analisis Teks
Solidaritas Nasional?	<i>“Oleh karena itu, ini adalah satu kebutuhan bersama solidaritas dari seluruh aparat pemerintah pusat maupun aparat pemerintah daerah.”</i>	Pada kalimat tersebut menjelaskan kata “bersama solidaritas” yang ditujukan dari seluruh aparat pemerintah pusat maupun aparat pemerintah daerah. Solidaritas yang dimaksud adalah untuk mempersatukan semua aparat dalam kaitan stabilitas perkembangan ekonomi dan keamanan negara. Memperlibatkan semua aparat tersebut dengan tujuan menjaga situasi dan kondisi dalam wilayah negara. Dengan kata lain pada kalimat tersebut menjelaskan bahwa, pemerintah tidak mengikutsertakan rakyat dalam maksud solidaritas yang dibicarakan, solidaritas yang dimaksud hanya berpusat pada kubu pemerintah itu sendiri
	<i>“Bapak Presiden akan selalu beserta rakyat dan selalu bersama-sama rakyat dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat bersama dukungan Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bersama-sama seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kita.”</i>	Kalimat tersebut seakan menegaskan bahwa Presiden berada di pihak rakyat dalam kalimat “selalu beserta rakyat dan selalu bersama-sama rakyat dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat” bahwa Presiden memberikan keberpihakannya untuk rakyat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Dilanjutkan pada keterlibatan dan dukungan aparat keamanan negara seperti Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sekali lagi menunjukkan bahwa keterlibatan TNI dan Polri tentu saja berkaitan dengan situasi dan keamanan negara Indonesia.
	<i>“Mari kita teruskan persatuan dan kesatuan nasional untuk terus berjuang meningkatkan kebangkitan ekonomi kita dengan stabilitas nasional</i>	Kata ajakan atau yang bersifat persuasif dapat dilihat pada kalimat “Mari kita teruskan persatuan dan kesatuan nasional,” yaitu mengajak rakyat untuk bersama terlibat dalam persatuan dan kesatuan bangsa sebagai bentuk solidaritas

	<i>yang kita wujudkan bersama-sama.”</i>	nasional antara rakyat dan pemerintah. Hal ini menjelaskan bahwa posisi Presiden, TNI, dan Polri tersebut setara dengan rakyat. Padahal jelas bahwa terdapat relasi kuasa di dalamnya yang tidak dalam posisi setara, antara rakyat yang tidak memiliki wewenang atau kuasa, dibanding dengan Presiden juga TNI dan Polri.
--	--	--

E. BAHASAN

A. Legitimasi Kekuasaan Dalam Pemerintah

Legitimasi kekuasaan merujuk pada penerimaan serta pengakuan masyarakat terhadap suatu kekuasaan yang dimiliki oleh perorangan atau institusi tertentu. Legitimasi tidak sekadar pengakuan formal atas kekuasaan yang dipunyai pemerintah, tetapi juga mencakup kepercayaan publik terhadap proses, kebijakan, dan praktik pemerintahan yang dijalankan (Sumitro & Yorman, 2024).

Dalam praktik diskursifnya, berkaitan dengan aksi demo atau unjuk rasa yang telah terjadi dilakukan masyarakat pada Agustus 2025, hingga membuat TNI dan Polri turun untuk menertibkan, mengingat tugas dan wewenang mereka yang notabnya bertugas untuk menjaga keamanan wilayah negara, hal ini memiliki arti bahwa aksi tersebut merujuk pada aksi demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan masyarakat merupakan tindakan atau aksi yang tidak aman, sehingga perlu diamankan oleh Polri dan TNI. Pada penjelasan tersebut memberi pengertian bahwa demonstrasi adalah sesuatu yang tidak aman dan mengancam negara itu sendiri. Artinya disini menyingung bahwa, turunnya Polri dan TNI adalah untuk menyerang rakyatnya yang dicurigai melakukan tindakan yang dapat menggoyahkan keutuhan dan keamanan Negara Republik Indonesia.

Dalam praktik sosialnya menjelaskan bahwa, berdasarkan fungsi dan tugas Polri dan TNI yang namanya disebutkan berulang kali oleh Menteri Pertahanan dalam keterangan persnya menunjukkan bahwa, berkaitan dengan situasi kewananan negara, maka sudah menjadi tugasnya

TNI dan Polri turun untuk menertibkan masyarakat berkaitan dengan stabilitas situasi keamanan negara Indonesia saat aksi demonstrasi yang terjadi bulan Agustus 2025. Sebagai alat keamanan negara TNI dan Polri menjadi benteng utama berkaitan dengan stabilitas keamanan nasional yang terjadi dalam wilayah negara Indonesia. Polri seharusnya juga sungguh-sungguh dipandang sebagai alat negara sebagaimana amanat konstitusi, tidak pada sebaliknya, yaitu dipahami sebagai lembaga atau alat pemerintah. Meski Polri secara institusi berada di bawah Presiden, tetapi hal tersebut tidak dapat dipahami bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Kedudukan Presiden berkaitan dengan keberadaan institusi Polri dipahami bahwa Presiden sebagai kepala negara. Melalui model pemaknaan demikian, maka institusi Polri menjadi alat negara yang bertugas untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat (Simamora & Simatupang, 2025). Wewenang yang dimiliki oleh anggota TNI dan Polri berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh TNI dan Polri dalam menangani demonstrasi, hal ini tentu saja dilegitimasi oleh masyarakat. Maksud dalam hal ini adalah apapun yang dilakukan TNI dan Polri dalam mengatasi demonstrasi adalah suatu hal atau tindakan yang dilegitimasi oleh masyarakat. Hal ini merujuk pada legitimasi kekuasaan dalam pemerintahan, yaitu pemerintah telah mendapatkan haknya secara sah untuk mengatur dan memerintah warga negara, atau para pemerintah dalam hirarkinya yang memiliki otoritas tertinggi, seperti contoh adalah presiden, yang memerintah aparatur keamanan negara dalam menangani adanya demonstrasi, seperti pada unjuk rasa yang terjadi pada Agustus 2025.

Pada kekerasan simbolik Pierre Bourdieu dalam (Fashri, 2014) menjelaskan bahwa kekerasan simbolik bekerja menyembunyikan paksaan dominasi untuk menjadi hal yang dapat diterima sebagai “*yang memang seharusnya demikian.*” ini membuktikan pada akhirnya mereka yang terdominasi menjadi merasa tidak keberatan untuk dikuasai dan berposisi dalam lingkaran dominasi itu sendiri. Mengidentifikasi dengan apa yang terjadi, membuktikan bahwa, apa yang dilakukan oleh Polri dan TNI seakan-akan sudah menjadi sewajarnya para aparat melakukan hal demikian, seperti penggunaan gas air mata untuk menertibkan rakyat. Para masyarakat yang terdominasi secara tidak sadar atau sebut saja “*dengan ikhlas*” menganggap, bahwa “*yang memang seharusnya demikian.*” Atau dalam artian apa yang dilakukan Polri, TNI, dan BIN memang itu sudah menjadi tugasnya sebagai badan keamanan negara.

B. Demonstrasi = Anarkis

Mengidentifikasi dengan apa yang terjadi pada aksi unjuk rasa Agustus 2025, dalam praktik diskursifnya menunjukkan, bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan bukan hanya untuk mengeluarkan aspirasi rakyat, tetapi juga berujung pada aksi-aksi yang dianggap berbahaya, seperti perusakan fasilitas umum, pembakaran, hingga pejarahan yang dilakukan. Turunnya menteri pertahanan dalam keterangan persnya juga berkali-kali menyebutkan *“penindakan tegas”* yang merujuk untuk para demonstran yang dinilai bahwa, aktivitas yang dilakukan adalah sebuah pelanggaran. Hal ini tentu saja dapat dicermati dengan mudah, bahwa pengulangan yang ada pada kalimat tersebut seakan menunjukkan simbol yang secara tidak langsung beroperasi di olah pikir masyarakat. Kata penindakan tegas juga dimaksud untuk memberi sebuah peringatan untuk rakyat, yang dalam hal ini menjadi suatu makna terselubung pemerintah, tetapi tidak terlihat secara langsung sehingga sulit untuk dimengerti rakyat secara sadar.

Dalam praktik sosialnya, demonstrasi merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang sah dilakukan oleh bangsa Indonesia, hal ini juga telah tertuang dan di atur dalam Pasal 28E Ayat (3), pasal ini menjelaskan jaminan konstitusional. Setiap individu mempunyai hak untuk menyuarakan pendapatnya secara kolektif, salah satunya unjuk rasa atau dengan demonstrasi. Untuk itu, unjuk rasa atau demo yang dilakukan di hadapan umum merupakan hal yang sah diselenggarakan oleh kelompok dalam masyarakat, sebagai jalan untuk menyampaikan aspirasinya. Oleh karena itu demonstrasi yang dilakukan masyarakat Indonesia pada Agustus 2025 adalah menjadi bagian dari cara untuk menyampaikan aspirasinya terhadap pemerintah di depan umum. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kebebasan menyatakan pendapat secara konseptual diatur dalam Pasal 28 yang menyatakan “kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang-undang. Lebih lanjut diatur pula dalam undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum pasal 9 ayat 1 yang membolehkan penyampaian pendapat dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi. Kebebasan

menyampaikan pendapat juga merupakan cerminan dari satu nilai demokrasi yaitu kebebasan. (Pakpahan & Yusuf, 2025).

Meski banyak pemberitaan yang mengatakan bahwa demonstrasi Agustus 2025 merujuk pada aksi yang anarkis, tetapi hal ini juga dapat dibantah dengan beredarnya video oknum yang melakukan perusakan fasilitas umum, sehingga bersamaan dengan aksi demo, maka hal ini dikemas sedemikian rupa supaya aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat adalah sebuah aksi anarkis yang patut untuk ditindak tegas di mata pemerintah. Meski terdapat adanya informasi yang lain, bahwa oknum yang tidak bertanggung jawab itulah yang melakukan perusakan. Lewat narasinya dalam teori kekerasan simbolik Pierre Bourdieu, pada dimensi teks yang telah dibedah tadi merujuk pada pengulangan frasa maupun klausa “penindak tegas”.

*“tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah yang terukur dan **tegas**,”*

*“Presiden memberi **penegasan**,”*

*“**penindakan yang tegas** dan secara hukum,”*

*“petugas tidak ragu-ragu untuk mengambil **tindakan tegas**”*

*“akan **bersikap tegas**”*

Pengulangan frasa tersebut secara tidak langsung memberi ancaman kepada publik tentang aksi mereka yang dianggap melanggar hukum sehingga harus ditindak tegas dan diamankan melalui aparaturnya keamanan negara. Kekerasan secara tidak sadar dialami oleh seseorang, dilakukan secara halus, serta memiliki maksud tertentu yang tersembunyi melalui media bahasa disebut sebagai bentuk kekerasan simbolik (Pujiningtyas, 2015) dalam (Husain et al., 2024).

Pada kata-kata yang diulang berdasarkan keterangan pers Menteri Pertahanan seakan memberi ancaman kepada masyarakat, hal ini berkaitan dengan olah pikir emosional para komunikannya yang dalam maksud ini adalah pesan untuk demonstrasi yang merasa terancam, khawatir, dan takut terhadap pengulangan kata “penindak tegas” yang ditujukan untuk mereka. Tekanan emosi tersebut juga sejalan dengan penjelasan mengenai kekerasan simbolik Pierre

Bourdieu, karena menyerang di wilayah olah pikir, kekerasan simbolik ini biasanya diterima secara sukarela oleh korban. (Husain et al., 2024).

C. Solidaritas Nasional?

Praktik diskursif dalam narasi tersebut menjelaskan bahwa letak yang namanya solidaritas nasional sekali lagi tidak ditujukan untuk pemerintah kepada masyarakat, melainkan hanya bentuk kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas untuk menjaga atau mendisiplinkan masyarakat. Tetapi dalam kalimatnya, menteri pertahanan yang merujuk untuk demi menjaga keamanan dan kepentingan masyarakat dibungkus dengan kata-kata yang tersusun rapi, seakan tindakan apapun yang dilakukan pemerintah adalah suatu aksi positif untuk melindungi masyarakat atau dalam wilayah bangsa itu sendiri. Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan menteri pertahanan dalam keterangan persnya, bahwa apa yang terjadi yang dilakukan pemerintah dibungkus untuk sebagai salah satu cara demi menjaga keamanan bangsa atau para demonstrasi. Selain itu dalam keterangan persnya juga menteri pertahanan mengajak para masyarakat untuk teruskan persatuan dan kesatuan demi menjalankan stabilitas nasional. Dimana dalam pernyataan tersebut, masyarakat diajak bekerja sama demi menjalankan stabilitas keamanan nasional. Sederhananya, semua yang dilakukan pemerintah adalah mengajak para masyarakat untuk percaya bahwa apa yang dilakukan pemerintahan adalah bagian dari cara untuk demi kebaikan rakyat, dan menjadi salah satu solusi dalam menangani demonstrasi.

Dalam praktik sosialnya. Solidaritas adalah suatu sikap atau tindakan yang dipunyai oleh manusia yang berkaitan dengan bentuk ungkapan dalam perasaan manusia atas rasa senasib dan sepenanggungan terhadap orang lain ataupun pada kelompok. Makna solidaritas dekat dengan makna rasa simpati dan empati, hal ini dikarenakan dasar dari atas rasa kepedulian dengan orang lain maupun kelompok. (Putri et al., 2019). Begitu juga dengan pengertian menurut (KBBI) bahwa solidaritas sendiri adalah suatu sifat yang dimiliki manusia secara solider atau suatu perasaan setia kawan terhadap orang lain ataupun dalam kelompok. Hal ini merujuk pada bentuk solidaritas atau tindakan yang benar-benar dilakukan atas dasar yang sama dan kepentingan yang sama pula. Solidaritas yang dimaksud juga tentu saja adalah rasa senasib serta

kebersamaan dalam menjalankan atau memberikan kepentingan yang sama dalam suatu kelompok. Bentuk bentuk solidaritas seperti kebersamaan dalam melawan atau bahkan menjalankan suatu hal dengan solid sehingga memberikan dampak yang positif juga. Dengan demikian dapat diketahui bahwa, rasa solidaritas yang tinggi akan mempengaruhi keharmonisan suatu kelompok atau tatanan masyarakat tersebut, apalagi dalam dunia politik. Tidak lain dengan bentuk rasa solidaritas dalam keterangan pers Menteri Pertahanan yang dimaksud atas dasar bersama membangun solidaritas nasional, dalam rangka menjalankan kepentingan rakyat, juga berkaitan erat dengan aksi yang dilakukan oleh masyarakat. Sekali lagi apabila berdasar pada keterangan pers Menteri Pertahanan menunjukkan bahwa solidaritas yang dibangun adalah hanya untuk pada pemerintah saja. Artinya rasa solidaritas nasionalisme hanyalah omong kosong yang patut dipertanyakan.

Kekerasan simbolik dapat terjadi kapan dan dimana saja, dari kehidupan sehari-hari hingga ke persoalan yang besar. Sebagai contoh, ketika negara memproduksi wacana, menyebarkan berbagai seruan, ajakan, slogan, ataupun ideologi tertentu kepada masyarakat. Wacana *good governance*, contohnya diproduksi oleh aparatus negara dengan tujuan kemudian diterima oleh suatu masyarakat sebagai satu-satunya solusi untuk perbaikan sebuah bangsa (Fashri, 2014). Hal ini sejalan dengan keterangan pers menteri pertahanan, bahwa ajakan, seruan, dan pernyataan, atau bahkan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sesuatu yang dianggap sebagai satu-satunya solusi untuk menjaga dan mempertahankan keamanan negara, sehingga masyarakat tidak ada pilihan lain, selain percaya dengan apa yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus atau sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat. Pada akhirnya, masyarakatpun menerima dan bahkan tidak sadar dengan penerimaan atau suatu tindakan secara halus yang dilakukan oleh pemerintah untuk rakyatnya.

F. KESIMPULAN

Setelah dianalisis dan ditemukan setidaknya terdapat tiga wacana yang di dapat, bahwa hasil dalam penelitian ini menunjukkan wacana yang memandang prespektif pemerintah yang cenderung negatif kepada para pendemo, hal ini dapat dilihat pada demonstrasi yang terjadi sepanjang Agustus 2025 merupakan aksi yang anarkis di mata pemerintah, selain itu memberi

pandangan terkait soal legitimasi kekuasaan pemerintah yang telah diterima oleh rakyat, dan solidaritas nasional hanya omong kosong pemerintah belaka yang patut dipertanyakan. Ketiga wacana tersebut juga masing-masing mengandung adanya kekerasan simbolik, dimana hal itu terjadi melalui adanya modal dan kebiasaan dalam negara itu sendiri. Hal ini merujuk pada pengetahuan dan hirarki kekuasaan yang telah menurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam suatu tatanan negara.

Wacana tentang legitimasi kekuasaan dalam pemerintahan. Hal ini merujuk pada apapun yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan aksi demonstrasi Agustus 2025 adalah hal yang diakui dan diterima oleh masyarakat, sebagai pemerintah yang memiliki wewenang atau kekuasaan dalam memerintah, termasuk pada anggota kementerian hingga berdampak pada warga negara. Artinya tugas TNI dan Polri tentang keamanan negara, berkaitan dengan aksi demonstrasi, menjelaskan seperti menjamin keamanan dan mengayomi warga negara seperti apa yang dimaksud? Jika dalam hal ini para demonstran yang notabnya rakyat sendiri diserang oleh aparat.

Wacana kedua adalah tentang prespektif atau sudut pandang dari pemerintah yang menilai bahwa demonstrasi yang dilakukan masyarakat adalah suatu tindakan yang anarkis yang harus ditindak tegas, hal ini juga didukung oleh pemberitaan media massa *online* yang menulis berita berkaitan dengan aksi tersebut, tetapi kemudian dibantah dengan beredarnya video-video yang menunjukkan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat, aksi yang dianggap pemerintah merupakan aksi yang anarkis sebagai bagian dari ulah pendemo adalah tidak sepenuhnya benar.

Wacana ketiga adalah, tentang narasi besar berkaitan dengan solidaritas nasional yang dimaksudkan oleh menteri pertahanan. Menjadi pertanyaan bahwa solidaritas nasional yang dimaksud adalah hanya sebatas pada solidaritas dan kerja sama antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah untuk menertibkan masyarakat. Artinya solidaritas tersebut tidak ada hubungannya dengan masyarakat, atau tidak mengikut sertakan masyarakat di dalamnya.

Pantaslah pernyataan tersebut benar terbukti, bahwa para demonstrasi yang berujung pada penembakan peluru karet, penembakan gas air mata, dan penangkapan. Hal ini sejalan dengan pernyataan menteri pertahanan tersebut untuk bersama dalam menangani masalah. Keterangan persnya seakan ingin mengatakan kepada publik, bahwa percayalah kepada mereka para pemerintah negara untuk menangani situasi yang sedang terjadi. Wacana solidaritas nasional hanyalah omong kosong pemerintah untuk memberi pernyataan kepada publik, bahwa pemerintah akan selalu bersama rakyat dalam menjalankan kepentingan rakyat, yang sekali lagi memberi pertanyaan, bahwa kepentingan rakyat mana yang dimaksud, nyatanya tidak sejalan dengan apa yang terjadi saat aksi demonstrasi oleh masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan yang ada, beberapa saran yang dapat diajukan adalah, bahwa apa yang terjadi dengan masyarakat seperti aksi demonstrasi Agustus 2025 merupakan sebuah aksi yang tentunya di latar belakang oleh apa yang dilakukan pemerintah itu sendiri kepada rakyatnya. Aksi demonstrasi sekali lagi merupakan aksi yang sah yang boleh dilakukan di Indonesia, sehingga masyarakat dapat melakukan aksi protes tersebut di muka umum. Penulis memandang, bahwa aksi demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025, yang dilatar belakang oleh beberapa hal. Pada aksi tersebut seharusnya pemerintah mendengarkan dengan baik keluhan publik terkait Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang menjadi fokus utama dalam permasalahan yang terjadi. Pemerintah juga tidak seharusnya memandang atau memberi penilaian pada satu sisi saja, maksud dalam hal ini adalah pemerintah hendaklah memandang dari segala sisi. Selain itu, untuk penelitian lebih lanjut disarankan untuk kembali mengembangkan hasil penelitian yang ada dengan mengambil sudut yang berbeda dari apa yang peneliti lakukan, supaya penelitian lebih mengarah kepada ranah yang lebih luas.

Sumbangsih terhadap bidang keilmuan dalam penelitian ini diharapkan, bahwa tema yang diangkat peneliti dapat menambah referensi dalam kajian komunikasi terutama pada komunikasi politik dan pada analisis wacana kritis (AWK).

REFERENSI

- CNBC Indonesia (2025). Kronologi Demo 25-29 Agustus : Demo DPR Melebar Jadi Amarah Ke Polisi. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250830145726-4-662882/kronologi-demo-25-29-agustus-demo-dpr-melebar-jadi-amarah-ke-polisi> Diakses pada 11 November 2025.
- Fashri, Fauzi (2014). Pierre Bourdiue; Menyingkap Kuasa Simbol: Jalasutra
- Aji, P., Pratama, S., Yahya, A. K., Studi, P., & Komunikasi, I. (2023). *Dinamika Partisipasi Politik Kaum Muda Dalam Platform Media Sosial Instagram dan YouTube*. 2(1), 15–24.
- Husain, J. R., Talani, N. S., & Tamu, Y. (2024). Kekerasan Simbolik Pada Teks Pemberitaan COVID-19 Di Media Daring Gorontalo. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23(2), 167–176.
<https://doi.org/10.31599/jb3nry97>
- Jose, T. Z. A. (2024). *Analisis Wacana Kritis Sara Mills pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Media BeritaSatu.com*. IX–78.
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/82969/1/Anissa Zahra Tayama Jose-Fdk_L.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/82969/1/Anissa%20Zahra%20Tayama%20Jose-Fdk_L.pdf)
- Murbantoro, M. D., Studi, P., Komunikasi, I., & Yogyakarta, U. A. (2023). *Personal branding ganjar pranowo dalam membangun*. 2(1), 123–138.
- Oktariza, S., Rafni, A., Suryanef, S., & Hamdi, I. (2025). Aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Negeri Padang sebagai saluran aspirasi politik. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 4(1), 237–247. <https://doi.org/10.24036/jecco.v4i1.403>
- Pakpahan, A., & Yusuf, H. (2025). Kekerasan Aparat Terhadap Demonstran Dalam Revisi UU TNI: Tinjauan Pidana dan Ham. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2), 760–772.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15783168>

JURNAL ILMIAH KAJIAN KOMUNIKASI

- Pasaribu, M., Dewi, Y. R., & Oktaviani, W. (2024). Penggunaan Konten YouTube Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Pada Brand Jakarta Uncensored. *Jurnal Cyber PR*, 4(1), 29–39. <https://doi.org/10.32509/cyberpr.v4i1.4220>
- Putri, K. H., Zakso, A., & Salim, I. (2019). Pengaruh Solidaritas Teman Sebaya Terhadap Pembentukan Konsep Diri Siswa Sma Negeri 2 Pontianak. *Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Khatulistiwa*, 8(3), 1–8.
- Simamora, J., & Simatupang, L. D. (2025). Penguatan Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional Polri sebagai Alat Negara dalam Bidang Keamanan dan Ketertiban. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 15(2), 159–181. <https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4424>
- Sumitro, & Yorman. (2024). Legitimasi Pemerintah dalam Perspektif Demokrasi Modern: Analisis atas Partisipasi Publik dan Akuntabilitas Politik. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(5), 243–251. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i5.1578>
- Tania, E., & Hermaliza, H. (2021). Analisis Konteks Wacana dalam Buku Kumpulan Cerita Rakyat Daerah Se-Provinsi Riau. *J-LELC: Journal of Language Education, Linguistics, and Culture*, 1(1), 67–72. <https://doi.org/10.25299/j-lelc.2021.6155>
- YouTube, Sekretariat Presiden (2025). LIVE : Keterangan Pers Menteri Pertahanan , Kantor Presiden,31Agustus2025.<https://www.youtube.com/live/SjwdR1iBEQ?si=mNdLvmP657YMatQx>. Diakses pada 24 September 2025.